

PEMERINTAH KOTA  
BALIKPAPAN



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataa'la, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dikaruniai kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2024.

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dokumen kontrak kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan yang kemudian pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah.

Penyusunan LKjIP sendiri berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan mempunyai Peran dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel. Dalam rangka pemenuhan tujuan tersebut Sekretariat Daerah telah mengupayakan pencapaian kinerjanya melalui kegiatan koordinasi dan monitoring rutin terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja. Kendala utama yang dihadapi terkait pencapaian tujuan Sekretariat Daerah adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam upaya pencapaian target Peningkatan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah. Adapaun strategi yang kedepannya akan diupayakan adalah menerapkan implementasi kebijakan penataan pegawai sesuai analisis jabatan yang telah dilakukan di tahun sebelumnya serta penguatan atas *Standard Operational Procedure* (SOP) kegiatan sehingga tidak terjadi pencapaian atas target pekerjaan yang tidak maksimal.

Semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 yang disusun selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Balikpapan, Februari 2025

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan telah ditetapkan 1 Tujuan, 3 Sasaran dan 3 Indikator Sasaran. Namun di tahun 2023 telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 900/0157/Keu Tertanggal 23 Desember 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 digambarkan perubahan jumlah Indikator Sasaran Strategis menjadi 7 butir sasaran Strategis. Capaian indikator sasaran dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran dari Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” dengan rata-rata capaian dari 3 indikator “Skor LPPD Kota Balikpapan”, “Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti” dan “Presentase produk kukum yang difasilitasi dan di harmonisasi” sebesar 113,09% atau mendapat predikat **Melebihi Target**”;
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan” dengan rata-rata capaian dari 3 Indikator “Nilai inflasi daerah”, “Nilai indeks tata kelola pengadaan”, dan “Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan” sebesar 138,74% atau mencapai predikat **Melebihi Target**;

3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan Indikator “nilai SAKIP Sekretariat Daerah” capaian sebesar 96.62% atau Predikat **Tidak Tercapai**.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan nilai rata-rata 121,73% atau dengan Predikat **Melebihi Target**.

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan Sekretariat Daerah selama TA 2024 tentunya ditemui kendala kendala seperti :

1. Rekomendasi dari Inspektorat Kota Balikpapan perihal penyempurnaan pohon kinerja yang juga dapat mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain yang bersinggungan dengan kinerja instansi pengampu (*cross cutting*);
2. Masih terjadi pengajuan penerbitan dokumen berupa kebijakan atau MoU Kerjasama daerah yang dilaksanakan menjelang akhir tahun berjalan sehingga tidak mencukupi waktu untuk ditindaklanjutinya pelaksanaan kerjasama berupa pembuatan dokumen kerjasama di tahun berjalan;
3. Belum terpenuhi secara maksimal Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan terutama pada keahlian khusus seperti keahlian di Bidang Hukum, Keprotokolan ataupun Keahlian pada bidang pengadaan Barang dan Jasa.

Upaya yang dilakukan dalam rangka langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi juga telah diambil, beberapa diantaranya :

1. Dilakukan revisi/perbaikan atas indikator tujuan/sasaran pada Tujuan dan Sasaran Renstra berupa Perjanjian Kinerja Perubahan dan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2023 yang bersesuaian dengan kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART);
2. Penyajian pelaporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran serta tingkat akurasi data sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (feedback) bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepannya melalui pendampingan dan desk penyusunan laporan kinerja;
3. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan koordinasi bersama antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan TPID Kota Balikpapan berupa pelaksanaan high level meeting TPID, inspeksi pasar dan kawasan pertokoan, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (PGM) serentak di Kota

Balikpapan;

4. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan keahlian melalui program pelatihan, bimbingan teknis dan uji kompetensi. Seperti pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bagi Bidang Hukum atau Sosialisasi Penggunaan LPSE Kota Balikpapan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk tahun 2024, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Balikpapan, Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Isu Strategis)	6
1.6 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	30
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	33
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	40 38
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan mengacu pada SPM / Standar Nasional / Internasional ( <i>Benchmark</i> Kinerja)	42
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	46
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	57
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
3.3 Realisasi Anggaran	76
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	82
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1	Daftar Aparatur PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024	6
2.1	Perencanaan Strategis Setda Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026	12
2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	14
2.3	Indikator Kinerja Utama Perubahan 2021 – 2026	23
2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	25
2.5	Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	26
2.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	29
3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 atas Penilaian Tahun 2024	30
3.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 atas Penilaian Tahun 2024	31
3.3	Predikat Capaian Kinerja	32
3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	33
3.5	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	36
3.6	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2026	41
3.7	Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu Pada SPM/Standar Nasional/International ( <i>Benchmark</i> Kinerja)	42
3.8	Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024	47
3.9	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	58
3.10	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	67
3.11	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menurut Tingkat Pendidikan	68
3.12	Jumlah Aset yang Dimiliki dan Tidak Dipakai	69
3.13	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	71
3.14	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024	78

**DAFTAR GAMBAR**

1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	5
3.1	Grafik Perbandingan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan Provinsi Kaltim Tahun 2024	46
3.2	Pelaksanaan Forum OPD Sekretariat Daerah	50
3.3	Pelaksanaan Rakordal Pemantauan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Balikpapan Tahun 2024	55
3.4	Pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) TPID dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	57
3.5	Kegiatan Monitoring Tapal Batas Kelurahan Graha Indah - Kelurahan Karang Joang	65

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berisikan tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan selaku unsur penunjang pemerintahan daerah, dituntut agar selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

kinerja program/kegiatan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan di Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimasa yang akan datang.

#### **1.4 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan ditunjang dengan uraian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Tata Pemerintahan membawahkan;
  1. Bagian Pemerintahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
    - a) Substansi Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah;
    - b) Substansi Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
    - c) Substansi Ketenteraman, Ketertiban dan Kemasyarakatan.
  2. Bagian Kerjasama dan Perkotaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
    - a) Substansi Kerjasama Daerah;
    - b) Substansi Administrasi Wilayah;
    - c) Susbtansi Manajemen Perkotaan.
  3. Bagian Hukum, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
    - a) Substansi Bantuan Hukum;
    - b) Substansi Peraturan Perundang-undangan;

- c) Substansi Dokumentasi Hukum.
- 4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
  - a) Subbagian Protokol;
  - b) Substansi Dokumentasi Pimpinan;
  - c) Substansi Humas Pimpinan.
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan;
  - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
    - a) Substansi Produksi Daerah;
    - b) Substansi Sarana dan Prasarana Perekonomian;
    - c) Substansi Pengembangan Perekonomian Daerah.
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
    - a) Substansi Program Kerja;
    - b) Substansi Pengendalian;
    - c) Substansi Pelaporan.
  - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
    - a) Substansi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - b) Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
    - c) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
    - a) Substansi Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b) Substansi Kepemudaan, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    - c) Substansi Sosial dan Kesehatan.
- d. Asisten Administrasi Umum membawahkan ;
  - 1. Bagian Organisasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
    - a) Substansi Kelembagaan;
    - b) Substansi Tatalaksana dan Pembinaan Pelayanan Publik;
    - c) Substansi Pengembangan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja.
  - 2. Bagian Keuangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:

- a) Substansi Analisa Keuangan dan Perencanaan Anggaran;
  - b) Substansi Perbendaharaan;
  - c) Substansi Pembukuan dan Pelaporan Keuangan.
3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dengan substansi:
- a) Substansi Tata Usaha Pimpinan;
  - b) Substansi Rumah Tangga;
  - c) Substansi Perlengkapan.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sumber : Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan data Simpeg Tahun 2024 sebanyak 126 orang dan Tenaga PPPK sebanyak 6 Orang.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Aparatur PNS dan PPPK**  
**Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan			
	Laki Laki	Prempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana/D4	Dipl	SL TA
SEKRETARIS DAERAH	1		1				1			
ASISTEN	2	1	3				3			
STAF AHLI	1	1	2				2			
KABAG	6	4	10				5	5		
KASUBAG	1			1			1			
JFT	14	21	1	34			3	31		1
PELAKSANA	42	32	3	48	23		4	22	7	41
Jlh PNS	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>42</b>
Jlh PPPK	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>6</b>				<b>4</b>	<b>2</b>	
Jlh PNS + PPPK	68	64	20	89	23	0	19	66	9	42
<b>Jumlah</b>	<b>132</b>									

Sumber : Simpeg Sekretariat Daerah Tahun 2024

### 1.5 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 telah merumuskan isu strategis yang didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih. Isu strategis dalam Rencana Strategis Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 terfokus pada:

- 1) Isu Strategis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan terkait belum optimalnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing;
- 2) Isu Strategis terhadap Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa terkait belum optimalnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas;

- 3) Isu Strategis pelayanan Publik yang Prima terkait belum optimalnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BERAKHLAK;

Terkait dengan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif agar tujuan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Aspek-aspek strategis yang diemban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan meliputi :

1. Adanya keselarasan kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan otonomi daerah;
2. Optimalisasi koordinasi di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Berfungsinya mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Adanya sistem pelayanan yang mudah, aman, cepat, efisien, ekonomis, adil, transparan dan tepat sasaran;
5. Tersedianya aparatur yang professional untuk mendorong meningkatkan kinerja, transparan dan persaingan yang sehat.

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan di Tahun 2024 meliputi :

1. Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang semuanya berlangsung di Tahun 2024;
2. Keterbatasan Personil Sumber daya Manusia / Pegawai pada setiap bagian di Sekretariat Daerah dalam rangka menunjang semakin kompleksnya kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Penghapusan Tenaga Bantuan / Non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai Surat Edaran oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Fasilitasi Pelayanan Tamu dalam mendukung pembangunan IKN, dalam hal ini diantaranya Tamu Kenegaraan baik dari Pemerintah Pusat, Kementrian maupun Lembaga yang berkunjung ke Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Pokok Bahasan didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang secara garis besar memuat perencanaan, pencapaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, Indikator kinerja yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis, dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Bagian ini memuat dasar hukum kewajiban pembuatan Laporan Kinerja, menguraikan tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Perangkat Daerah dan pengantar terhadap keseluruhan isi laporan. Jika diperlukan dapat mengungkapkan harapan untuk perbaikan di masa mendatang.

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada bagian ini disajikan secara ringkas mengenai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic*

*issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu bab ini juga berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan, gambaran umum kondisi Perangkat Daerah, isu-isu strategis yang berkaitan dan sistematika penulisan laporan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bagian ini menjelaskan tentang rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan perjanjian kinerja yang menjadi target laporan kinerja serta rencana anggaran yang digunakan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

##### 1. Visi dan Misi Walikota

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Balikpapan Terpilih. Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”**

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari Visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota

Balikpapan merumuskan misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

### **"MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL"**

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis, berupa:

- a. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- c. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah

**TABEL 2.1**  
**PERENCANAAN STRATEGIS SETDA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR 2026		
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	10,88	11,86	11,86	11,87	11,87	11,87	11,87		
		1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	N/A	95,53%	98,03%	98,25%	98,47%	98,69%	98,69%
		2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	3	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	31,79	31,89	32,00	32,10	32,20	32,30	32,30

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 - 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan pengertian Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Didalam mengukur Kinerja diperlukan Indikator Kinerja sebagai tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Sedangkan, hasil (*outcome*) merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Rencana Kerja Tahunan adalah rencana selama setahun yang disusun untuk menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran sekretariat daerah Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan digambarkan sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PROGRAM/KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN/SASARAN**

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	32,10	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
										2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
										3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
										4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
										7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
								3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
										10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
								4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
										14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
										15	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
										17	Fasilitasi Kunjungan Tamu
										18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
										20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
										21	Pengadaan Mebel
										22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
										23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
										24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
								6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
										26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
								7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
										29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
										30	Pemeliharaan Mebel
										31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										32	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
										33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
										34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
										36	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
										37	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
								9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										39	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
										40	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
								10	Penataan Organisasi	41	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
								42		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
								43		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
								44		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
								45		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
								11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	46	Fasilitasi Keprotokolan
								47		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										48	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
		2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	98,25%	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	Administrasi Tata Pemerintahan	49	Penataan Administrasi Pemerintahan
										50	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
										51	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
								13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	52	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
										53	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
										54	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
								14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	55	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
										56	Fasilitasi Bantuan Hukum

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
										57	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
								15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	58	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
										59	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
		3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100%	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	60	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
										61	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
										62	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
								17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	63	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
										64	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
										65	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

NO	TUJUAN OPD	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
								18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	66	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
										67	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
										68	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 - 2026

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dengan Rekomendasi bahwa Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kota Balikpapan atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, sehingga diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 900/0157/Keu Tertanggal 23 Desember 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang digambarkan sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Indikator ini menggambarkan Hasil Evaluasi terhadap integrasi Sistem Perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Bagian Keuangan
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Nilai yang menggambarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat selama 1 Tahun	Hasil Evaluasi Kementrian Dalam Negeri	Laporan Hasil EPPD Kementrian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	Rasio yang menggambarkan jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Balikpapan terhadap jumlah keseluruhan kerjasama yang diajukan	(Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti/jumlah keseluruhan kerjasama) x 100%	MoU / Perjanjian Kerjasama	Bagian Kerjasama dan Perkotaan
		Presentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	Rasio yang menggambarkan jumlah produk hukum yang disahkan terhadap produk hukum yang diajukan untuk dibuat	(Jumlah Produk Hukum disahkan / Total Produk hukum yang akan dibuat) x 100%	Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Indikator yang menggambarkan nilai kenaikan harga barang maupun jasa secara terus menerus dalam jangka waktu 1 tahun	Tingkat inflasi daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Bagian Perekonomian
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi SDM dan kelembagaan maupun dari sistem pengadaan	Hasil Evaluasi Oleh LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (KLPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Rasio yang menggambarkan nilai capaian realisasi pembangunan fisik Pemerintah Kota Balikpapan	Hasil rata rata capaian realisasi fisik yang dilaporkan pada SIPERANGKO	Output Aplikasi SIPERANGKO	Bagian Administrasi Pembangunan

Sumber : Dokumen SK Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 900/0157/Keu

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan

diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dokumen perjanjian kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh.

Seiring dengan perkembangan APBD Kota Balikpapan dan hasil penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, bahwa perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 mengalami perubahan seiring dengan perjanjian APBD Perubahan Tahun 2024, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dibuat sesuai Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

**TABEL 2.4  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	79,00
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2 Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	3,16
		3 Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	95%
		4 Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan diharmonisasi	Persen	100%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	5 Nilai Inflasi Daerah	Persen	2,5±1%
		6 Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	63,50
		7 Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	95%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 190.555.121.572,- yang melalui mekanisme perubahan APBD menjadi

Rp. 201.722.747.430,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.242.490.407,- (82,91%).

Adapun pendanaan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 2.5**  
**PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>149.334.741.601</b>	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>127.600.000</b>	APBDP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.753.162.000</b>	APBDP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.505.662.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.000.000	
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.030.000.000</b>	APBDP
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000.000	
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>54.889.823.864</b>	APBDP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.042.124.580	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.574.103.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	800.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	450.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.273.595.684	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000.000	
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.564.420.000</b>	APBDP
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.548.800.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000	
	Pengadaan Mebel	500.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.107.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.158.120.000	
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>32.761.800.030</b>	APBDP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.400.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.361.800.030	
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.902.500.000</b>	APBDP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.200.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	160.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.017.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000.000	
8	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>2.426.070.157</b>	APBDP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	230.781.163	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.795.288.994	
9	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.840.000.000</b>	APBDP
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	940.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	750.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	150.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
10	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>943.865.550</b>	APBDP
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	204.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	306.900.000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	132.500.000	
	Monitoring. Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100.265.550	
11	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.095.500.000</b>	APBDP
	Fasilitasi Keprotokolan	737.000.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	720.500.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	638.000.000	
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>48.387.859.329</b>	
12	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>16.869.271.190</b>	APBDP
	Penataan Administrasi Pemerintahan	8.883.041.890	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	918.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7.068.229.300	
13	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>18.397.161.189</b>	APBDP
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.323.961.189	
	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.963.200.000	
	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	110.000.000	
14	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>2.598.457.300</b>	APBDP
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	549.277.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	799.180.300	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.250.000.000	
15	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>10.522.969.650</b>	APBDP
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10.257.969.750	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	264.999.900	
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>4.000.146.500</b>	
16	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>860.000.000</b>	APBDP
	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	500.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	160.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	200.000.000	
17	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>1.714.146.500</b>	APBDP
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	238.457.500	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	475.466.500	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1.000.222.500	
18	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.426.000.000</b>	APBDP
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	319.500.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	353.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	753.500.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>201.722.747.430</b>	

Sumber : Dokumen DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan TA 2024

Anggaran belanja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.6**  
**ALOKASI ANGGARAN BELANJA PER SASARAN STRATEGIS**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosentase	Pelaksana
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	149.334.741.601	74.03%	- Bagian Organisasi - Bagian Umum - Bagian Keuangan - Bagian Humas dan Protokol
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	48.387.859.329	23.99%	- Bagian Pemerintahan - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Hukum - Bagian Kerjasama
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4.000.146.500	1.98%	- Bagian Perekonomian - Bagian Adm Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber : Dokumen DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan TA 2024

## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024, Sekretariat Daerah menunjukkan nilai sebesar 76.33 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi terhadap AKIP pada Sekretariat Daerah sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja dalam rangka meningkatkan hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP di periode Berikutnya.

Adapun rincian dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dijabarkan pada Tabel Berikut :

**TABEL 3.1**  
**RINCIAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023 ATAS PENILAIAN TAHUN 2024**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,63
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,94
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,08
4	Evaluasi Kinerja	25%	17,67
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100%	<b>76,33</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Sumber : LHE AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, walaupun Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Sekretariat Daerah menunjukkan nilai sebesar 76,33 atau Predikat BB (Sangat Baik), namun dalam rangka lebih meningkatkan penerapan AKIP pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi yang perlu ditindaklanjuti. Matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dijabarkan pada tabel dibawah ini.

**TABEL 3.2**  
**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS**  
**KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023 ATAS PENILAIAN**  
**TAHUN 2024**

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Agar menyusun pohon kinerja yang dapat mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain yang melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja (Crosscutting)	Pohon Kinerja telah dibuat dengan mengidentifikasi kinerja dan melibatkan instansi sektor lain yang berkaitan dalam perencanaan kinerja
2	Pengukuran Kinerja	Memanfaatkan aplikasi pengukuran capaian kinerja yang telah ada secara maksimal yakni menentukan faktor pendukung dan penghambat beserta tindak lanjuti	Telah dilakukan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (REAKSI)
3	Pelaporan Kinerja	Menyusun Laporan Hasil Survey Pegawai yang telah dilaksanakan	Telah disusun Laporan atas Hasil Survey Pegawai perihal Pemahaman Pegawai terkait pemanfaatan Laporan Kinerja
4	Evaluasi Kinerja	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi yang telah ditetapkan yang berisi kendala/hambatan, rencana tindak lanjut dan dimonitoring hasil RATL (Rencana Aksi Tindak Lanjut) yang telah dilaksanakan	Telah disusun Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi dan dilaksanakan Tindak Lanjut atas Rencana Aksi tersebut

Sumber : Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 pada periode Tahun 2024 sebanyak 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan 7 (Tujuh) Butir Indikator Kinerja.

Sesuai Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana penilaian capaian kinerja atas capaian indikator pada setiap sasaran strategis digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perwujudan visi dan misi perangkat daerah. Adapun Interval capaian kinerja digambarkan melalui tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Predikat Capaian Kinerja**

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber : Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Faktor pendukung utama yang mendukung upaya pencapaian kinerja di Sekretariat Daerah adalah ketersediaan dana untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target sasaran.

Selanjutnya untuk menilai capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi perlu dilakukan analisis capaian kinerja yang dijelaskan pada setiap sub bab berikut.

### 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**  
**Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	79,00	76,33	96,62%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	3,16	3,16	100,00%	Tercapai
		Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	95%	93%	98,25%	Tidak Tercapai
		Presentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	Persen	100%	100%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	2,5±1 %	1,11%	199,56%	Melebihi Target
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	63,50	73,70	116,06%	Melebihi Target
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	95%	97,57%	102,71%	Melebihi Target

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

Seperti yang ditampilkan pada tabel diatas, capaian kinerja atas target sasaran strategis dari masing masing indikator adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target yang ditetapkan atas Indikator berupa Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah sebesar 79,00 poin dan realisasi yang diperoleh adalah pada angka 76,33 poin atau Capaian sebesar **96,62%** dari target. Dari hasil pengukuran ini menunjukkan capaian realisasi belum mampu memenuhi target yang diinginkan sehingga ditetapkan dengan predikat **Tidak Tercapai**;
- b. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berisikan 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan 3 (tiga) target yang ditetapkan atas indikator yaitu :
  - 1) Skor LPPD Kota Balikpapan dengan target sebesar 3,16 poin dengan perolehan realisasi adalah sebesar 3,16 poin atau capaian sebesar **100%** dari target yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran capaian diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi memenuhi predikat capaian **Tercapai atau Sesuai Target**;
  - 2) Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan target capaian 95% dengan perolehan realisasi adalah sebesar 93% atau capaian sebesar **98,25%** dari target yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa realisasi capaian atas indikator Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti memperoleh predikat **Tidak Tercapai**. Adapun jenis jenis perjanjian kerjasama yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berupa Kerjasama penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Komando Daerah Militer 0905 Balikpapan atau penyelenggaraan visum et repertum (VER) antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Kepolisian

Resor Kota Balikpapan dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo dan beberapa jenis perjanjian lainnya; dan

- 3) Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi dengan target capaian 100% dengan perolehan realisasi adalah sebesar 100% atau capaian sebesar **100%** dari target yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran menunjukkan realisasi capaian atas target memperoleh predikat **Tercapai atau Sesuai Target**.
- c. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan 3 (tiga) target yang ditetapkan atas indikator yaitu :
- 1) Nilai inflasi daerah dengan target yang ditetapkan atas indikator sebesar  $2,5 \pm 1\%$  dimana realisasi capaian kinerja sasaran adalah sebesar 1,11% sebesar **199,56%**. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja atas target sasaran kinerja adalah mencapai atau lebih besar dari target atau predikat **Melebihi Target**;
  - 2) Nilai indeks tata kelola pengadaan dengan target yang ditetapkan atas indikator sebesar 63,50 poin dimana realisasi capaian kinerja sasaran adalah sebesar 73,70 poin atau capaian kinerja sebesar **116,06%**. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja atas target sasaran kinerja adalah mencapai atau lebih besar dari target dengan predikat **Melebihi Target**; dan
  - 3) Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan dengan target yang ditetapkan atas indikator sebesar 95% dimana realisasi capaian kinerja sasaran adalah sebesar 97,57% atau capaian kinerja sebesar **102,71%**. Dari hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja atas target sasaran kinerja adalah telah melebihi seratus persen dari target sehingga mendapat predikat **Melebihi Target**.

Rata-rata keberhasilan capaian keseluruhan kinerja atas target dari Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2024 adalah sebesar **116,17%** yang mengindikasikan bahwa predikat atas realisasi kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah mencapai Predikat **Melebihi Target**. Hal ini menggambarkan, secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

### 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya dalam Sub Bab ini digambarkan Analisis atas Realisasi dan Capaian Kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2024 terhadap Realisasi Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya yang digambarkan sebagai berikut :

**TABEL 3.5**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**  
**Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	75,71	N/A	76,05	96,88%	76,33	96,62%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan	Skor LPPD Kota Balikpapan	2,51	N/A	3,16	120,94%	3,16	100,00%
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	95,65%	N/A	100%	133,33%	93%	98,25%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	aan Rakyat	Presentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	100%	N/A	100%	100,00%	97%	100,00%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Prekonomi dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	0,20%	N/A	3,60%	80,00%	1,11%	199,56%
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	43,10	N/A	58,34	100,59%	73,70	116,06%
		Presentase rata-rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	95,74%	N/A	96,64%	99,63%	97,57%	102,71%

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga pengukuran realisasi kinerja dari Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026 mengalami perubahan baik pada sasaran strategis maupun indikator kinerja Sekretariat Daerah sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan sasaran strategis yang berpengaruh terhadap perbedaan indikator capaian kinerja yang digunakan pada Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

Penjabaran hasil analisa dari masing masing Capaian Realisasi Kinerja tahun 2024 terhadap Capaian pada tahun lalu

(Tahun 2023) dan tahun tahun sebelumnya (Tahun 2022) dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator : Dengan Indikator Peningkatan Kualitas AKIP Sekretariat Daerah adalah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah ditunjukkan peningkatan sebesar 0,28 poin dari poin hasil capaian kinerja dari tahun sebelumnya (2022) senilai 75,71 poin pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,05 Poin pada tahun 2023 yang kemudian meningkat lagi di Tahun 2024 menjadi 76,33 poin menunjukkan peningkatan berturut turut setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat Daerah terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerjanya baik dari sisi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan maupun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internalnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Indikator : a. Capaian pada indikator kinerja Skor LPPD Kota Balikpapan mendapatkan nilai 3,16 poin. Skor LPPD tersebut merupakan hasil penilaian LPPD Tahun 2022 yang dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 dan diumumkan di tahun 2024. Nilai ini mengalami peningkatan dari perolehan Skor LPPD Kota Balikpapan tahun 2021 di angka 2,51 Poin dengan presentase kenaikan sebesar 25,89%. Hal ini juga menggambarkan usaha peningkatan pada kinerja Pemerintahan Daerah dalam pemenuhan indikator indikator yang telah ditetapkan dalam RKPD yang menunjukkan hasil yang cukup baik.

b. Indikator Kinerja Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti mencapai 93% di tahun 2024, nilai ini menurun dibandingkan realisasi capaian

kerjasama ditahun 2023 yang sebelumnya mencapai 100% maupun realisasi capaian di tahun 2022 di angka 95,65% sehingga capaian tahun 2024 ini dianggap belum memenuhi ekspektasi melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian realisasi indikator mencapai 93% ini disebabkan beberapa pengajuan perjanjian kerjasama baru diajukan di akhir tahun sehingga proses penetapan dan tindak lanjutnya baru kemudian terpenuhi dan dapat dijalankan di tahun berikutnya.

- c. Indikator Kinerja Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi pada tahun 2024 mencapai 100%, nilai ini sebanding atau tetap dibandingkan realisasi capaian tahun 2022 dan tahun 2023 di angka 100%. Hal ini terjadi disebabkan terdapat beberapa perda dan perwali yang diajukan selama tahun 2024 sebanyak 24 perda dan dan 50 Perwali seluruhnya dapat difasilitasi penyusunan dan diharmonisasi di tahun yang berjalan. Adapun untuk pengajuan pembuatan Surat Keputusan Walikota (Kepwali) sebanyak 504 berkas dapat ditetapkan seluruhnya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

- Indikator : a. Capaian pada indikator kinerja Nilai Inflasi Daerah menurun menjadi 1,11% daripada tahun sebelumnya (2023) yang berkisar diangka 3,60% namun meningkat dari Nilai Inflasi pada Tahun 2022 di angka 0,20% Pada Capaian ini digambarkan terjadinya naik turun atas kejadian Inflasi di Kota Balikpapan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan komoditas di pasar. Namun sejauh ini, tingkat Inflasi di Kota Balikpapan masih selalu berapa di bawah Nilai Inflasi Nasional yang

artinya kondisi Inflasi di Kota Balikpapan masih cukup terkendali.

- b. Indikator Kinerja Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan mengalami peningkatan yang cukup tajam di tahun 2024 pada angka 73,70 Poin yang mana nilai ini meningkat dari capaian Indeks tata kelola Pengadaan Pemerintah Kota Balikpapan ditahun 2023 di Poin 58,34 juga capaian Indeks di tahun 2022 di angka 43,10 poin. Konsistensi peningkatan terus menerus setiap tahun ini menggambarkan usaha Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan perbaikan perbaikan dan pemenuhan terhadap standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat atas Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Balikpapan untuk meningkatkan predikat "cukup" menjadi predikat "baik".
- c. Indikator Kinerja Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan di tahun 2024 mencapai angka 97,57%. Nilai ini meningkat dari persentase capaian rata rata realisasi fisik ditahun 2023 di angka 96,64% dan capaian rata rata realisasi fisik di tahun sebelumnya (2022) yang berada di angka mencapai 95,74%. Juga realisasi di Tahun 2024 mampu melebihi target yang telah ditetapkan mencapai 102,71% dari target. Hal ini menunjukkan perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan fisik di Kota Balikpapan yang semakin baik.

### **3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis**

Analisa berikutnya mengukur perbandingan capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum pada Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 seperti pada tabel di bawah ini:

**TABEL 3.6**  
**Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 - 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{5}{6} \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	76,33	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	3,16	N/A	N/A
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	93%	N/A	N/A
		Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi	Persen	97%	N/A	N/A
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Prekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	1,11%	N/A	N/A
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	73,70	N/A	N/A
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	97,57%	N/A	N/A

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Daerah Tahun 2024

Dikarenakan telah dilakukan revisi/perbaikan atas Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagaimana rekomendasi Inspektorat Kota Balikpapan, maka dari ketujuh Indikator pada 3 (tiga) Sasaran Strategis tidak dapat dibandingkan terhadap target akhir Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026. Hal ini karena tidak terdapat kesesuaian antar Target Akhir Indikator Kinerja pada Dokumen

Rencana Strategis terhadap Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 900/0157/Keu tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

### 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ International (*Benchmark Kinerja*)

Sub bab ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 terhadap SPM/Standar Nasional/International (*Benchmark Kinerja*) yang digambarkan pada tabel dibawah ini.

**TABEL 3.7**  
**Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/International (*Benchmark Kinerja*)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Realisasi SPM Provinsi/ Nasional 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	76,33	81,80	Nilai Sakip Provinsi Kaltim 2023
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	3,16	3,52	Skor LPPD Provinsi Kaltim
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	93%	-	
		Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi	Persen	100%	-	
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Prekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	1,11%	1,57%	Nilai Inflasi Nasional Tahun 2024
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	73,70	86,69	Nilai ITKP Provinsi Kaltim
		Presentase rata rata capaian	Persen	97,57%	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Realisasi SPM Provinsi/ Nasional 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		realisasi fisik Kota Balikpapan				

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Data BPS Tahun 2024

Tabel Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 terhadap Realisasi Capaian Nasional 2024 menunjukkan bahwa Sebagian Besar Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 atas Realisasi Capaian Nasional Tahun 2024 tidak dapat dilakukan perbandingan sebab :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tidak dapat dilakukan persandingan dengan realisasi Nasional sebab Nilai SAKIP digunakan sebagai pengukuran Kinerja untuk dilakukan perbaikan serta mendorong Instansi Pemerintah untuk melakukan Inovasi pada Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga penilaian SAKIP hanya dilakukan pada Level Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada Level Pemerintah Provinsi dapat disandingkan karena pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga dilakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dengan perolehan nilai 81,80 pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian realisasi Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan masih lebih rendah daripada capaian realisasi Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan oleh Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2022 di angka 73,90 ke tahun 2023 di angka 81,80 dengan penyebab utama pada perbaikan kualitas Perencanaan

Kinerja. Hal ini juga sebagai preseden baik sebagai pemicu bagi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk meningkatkan realisasi atas kualitas Kriteria penilaian kerjanya.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Skor LPPD Kota Balikpapan di angka 3,16 poin jika dilakukan persandingan terhadap capaian Skor LPPD Provinsi Kalimantan Timur masih lebih rendah dibanding capaian Skor LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada poin 3,52. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator atas beberapa komponen penilaian terhadap LPPD di Kota Balikpapan belum membandingi level Pemerintah Provinsi.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti merupakan indikator terhadap pelaksanaan kerjasama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sehingga tidak dapat disandingkan terhadap capaian indikator Pelaksanaan Kerjasama Nasional dikarenakan Sasaran Strategis yang ditetapkan merupakan Sasaran yang ditetapkan berdasarkan urusan penunjang pemerintahan yang bukan berdasarkan pelaksanaan urusan wajib sehingga tidak terdapat SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark* Kinerja).
4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Presentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi merupakan indikator yang menggambarkan rasio yang menggambarkan jumlah produk hukum yang disahkan terhadap produk hukum yang diajukan untuk dibuat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah sehingga tidak dapat disandingkan terhadap capaian indikator jumlah produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi pada tingkat nasional dan juga Sasaran Strategis yang ditetapkan merupakan Sasaran yang ditetapkan berdasarkan urusan

penunjang pemerintahan yang bukan berdasarkan pelaksanaan urusan wajib sehingga tidak terdapat SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*).

5. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan tidak dapat dilakukan persandingan terhadap Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional, sebab Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan penilaian terhadap indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan kelembagaan maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi sehingga hanya digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pada level Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga tidak terdapat Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan pada tingkat Nasional. Namun, pada level Pemerintah Provinsi capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Kota Balikpapan masih berada dibawah capaian Pemerintah Provinsi, namun berada pada posisi keempat tertinggi dari sepuluh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Perbandingan capaian nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Sumber : Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan tidak dapat dilakukan persandingan terhadap standar Nasional dikarenakan Sasaran Strategis yang ditetapkan merupakan Sasaran yang ditetapkan berdasarkan urusan penunjang pemerintahan yang bukan berdasarkan pelaksanaan urusan wajib sehingga tidak terdapat SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja).
7. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Nilai Inflasi Daerah terdapat perbandingan dengan Nilai Inflasi Nasional, dimana Nilai Inflasi Nasional Tahun 2024 sebesar 1,57% sedangkan Nilai Inflasi Kota Balikpapan adalah sebesar 1,11% sehingga tergambar bahwa Nilai Inflasi Kota Balikpapan lebih rendah daripada Nilai Inflasi Nasional mencapai 29%. Hal ini menggambarkan bahwa kenaikan harga berbagai komoditas baik berupa barang dan jasa di Kota Balikpapan jauh lebih rendah dibandingkan nilai kenaikan harga barang dan jasa secara Nasional.

### 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan tujuan pencapaian target atas Sasaran Strategis Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab yang terbagi atas Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat. Pada tahap ini, diuraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yang disajikan tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.8**  
**Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai / Sesuai Target (=100%)	Melebihi Target (>100%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	96,62	√		
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	100		√	
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	98,25	√		
		Presentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi	100		√	
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	199,56			√
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	116,06			√
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik	102,71			√

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai / Sesuai Target (=100%)	Melebihi Target (>100%)
1	2	3	4	5	6	7
		Kota Balikpapan				

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Melalui pengukuran capaian kinerja yang digambarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pencapaian atas target kinerja selama tahun 2024 sebagian besar memenuhi target Realisasi Kinerja yang ingin dipenuhi. Namun demikian, tetap saja masih terdapat beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan keberhasilan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Adapun beberapa analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada Tabel 3.8 : Ikhtisar capaian kinerja Tahun 2024 di atas tergambar bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah menunjukkan predikat **tidak tercapai**. Pada hakikatnya, realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2024 telah meningkat daripada capaian realisasi tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2024 yaitu 78,50 poin. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan peningkatan realisasi atas usaha capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

- a. Peningkatan Hasil Evaluasi atas AKIP Sekretariat Daerah Kota pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja serta Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- b. Peningkatan pada komponen Perencanaan Kinerja dipengaruhi telah dipenuhinya kriteria tersedianya dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek serta dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;
- c. Peningkatan pada komponen Pengukuran Kinerja didalamnya termasuk bahwa keseluruhan definisi operasional Sekretariat Daerah telah dijabarkan dengan jelas serta pelibatan Pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis serta pemahaman pegawai atas hasil pengukuran kinerja;
- d. Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal peningkatan Nilai Hasil Evaluasi dipengaruhi oleh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dibahas dengan pihak yang dievaluasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Sementara beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kegagalan tidak tercapainya target indikator berupa :

- a. Pohon kinerja telah dibuat menyesuaikan dengan IKU Perubahan namun belum dapat mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain (*Crosscutting*);
- b. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum seluruhnya dapat dicapai dengan baik;
- c. Capaian kinerja menggambarkan hasil yang menjadi sasaran kinerja namun sebagian besar belum menggambarkan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
- d. Laporan kinerja baru sebagian besar saja yang telah mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan

realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

Beberapa upaya solusi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka



Gambar 3.2 Pelaksanaan Forum OPD Sekretariat Daerah  
Sumber : Arsip Pribadi

Penyempurnaan Pohon Kinerja dengan identifikasi pada kinerja urusan organisasi dengan mengidentifikasi kinerja urusan/ sektor lain (*Crosscutting*);

- b. Penyusunan Laporan Survei Internal terhadap pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah terkait dengan tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang direncanakan, tingkat pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, serta tingkat kepedulian pegawai terhadap penggunaan informasi dalam laporan kinerja.
- c. Dilakukan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi dan pelaksanaan Tindak Lanjut atas Laporan Monitoring Rencana Aksi tersebut.

2) Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Melalui Tabel 3.8 perihal ikhtisar capaian kinerja Tahun 2024 di atas, tergambar bahwa rata rata hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menunjukkan predikat **Tidak Tercapai**. Hal ini disebabkan karena beberapa capaian indikator seperti kinerja Skor LPPD Kota Balikpapan dan persentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi dengan capaian kinerja 100,00%, namun terdapat satu Indikator yaitu persentase kerjasama yang ditindaklanjuti yang belum mencapai target capaian diangka 98,25%, sehingga rata rata capaian dari ketiga indikator memperoleh rata rata sebesar 99,42%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- a. Hal yang mempengaruhi pada Skor LPPD Kota Balikpapan Sebagian besar dipengaruhi oleh capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan terhadap setiap indikator kerjanya dapat memenuhi target sehingga memperoleh predikat "Melebihi Target". Utamanya pengaruh daripada capaian nilai SAKIP Kota Balikpapan, peningkatan capaian indeks pengelolaan keuangan daerah, pemenuhan indeks SPBE, maturitas SPIP, indeks sistem merit, peningkatan indeks kepuasan masyarakat, indeks pendidikan dan kesehatan, capaian indeks pembangunan literasi masyarakat, indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan, indeks warisan budaya, pemenuhan anggaran responsif gender (ARG), indeks pembangunan infrastruktur, permukiman layak huni, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase pemanfaatan ruang, indeks risiko bencana dan ketentraman ketertiban, peningkatan pertumbuhan UMKM, penurunan tingkat pengangguran

terbuka dan kemiskinan, peningkatan nilai realisasi investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan internasional, meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, dan peningkatan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.

- b. Koordinasi dan sinkronisasi yang intens antara pihak Pemerintah Kota Balikpapan dengan instansi vertikal seperti Kementrian dan lembaga juga organisasi masyarakat maupun dengan sesama Pemerintah Daerah terkait bentuk kerjasama berupa Sinergi Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengoperasian Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan, Pelaksanaan Pelatihan di Bidang Pertanian, maupun Sinergi terkait Pengembangan Ekonomi dan Penanganan Hukum dan lainnya yang kemudian ditindaklanjuti berupa pembuatan MOU Pelaksanaan Kerjasama sehingga dapat dilakukan percepatan dalam menghasilkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak Eksternal.
- c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, serta kepada pihak Eksternal seperti Kanwilkemenkumham dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan bidang Hukum sehingga dapat mempercepat pelaksanaan Harmonisasi terhadap Produk Hukum di Kota Balikpapan seperti Peraturan Walikota, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota.

Sementara hal hal yang menjadi faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Masih kurangnya Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang mempengaruhi capaian derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kinerja yang efektif sehingga mempengaruhi capaian skor LPPD Kota Balikpapan.

- b. Adanya pengajuan pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan menjelang akhir tahun berjalan sehingga tidak mencukupi waktu untuk ditindaklanjutinya pelaksanaan kerjasama berupa pembuatan dokumen kerjasama di tahun berjalan.
- c. Belum terpenuhi secara maksimal Jumlah Pegawai dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan terutama pada keahlian khusus seperti Pengetahuan terkait Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang mana jumlah dokumen Peraturan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat mencapai 557 Dokumen di Tahun 2024.

Beberapa upaya solusi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan mengenai pengelolaan PAD (termasuk PDRD) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- b. Modernisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM daerah, termasuk modernisasi proses pemungutan pajak (seperti penggunaan sistem teknologi informasi dan pembaruan data wajib pajak secara elektronik).
- c. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan keahlian melalui program pelatihan, bimbingan teknis dan uji kompetensi. Seperti pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bagi Bidang Hukum atau Sosialisasi Penggunaan LPSE Kota Balikpapan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Usaha Pembuatan *Standard Operational Procedure* (SOP) berupa kalender jadwal pengajuan teknis kerjasama

daerah pada setiap rencana pelaksanaan kerjasama daerah sehingga dapat mengefisienkan waktu dan meminimalisir keterlambatan tindaklanjut MOU Pelaksanaan Kerjasama.

3) Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pada Tabel 3.8. Ikhtisar capaian kinerja Tahun 2024 di atas, tergambar bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Perekonomian dan Pembangunan menunjukkan predikat **Melebihi Target** dikarenakan seluruh capaian indikator dapat melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya seperti Nilai Inflasi Daerah dengan rasio capaian kinerja mencapai 199,56% dengan realisasinya capaian sebesar 1,11% dimana target kinerja yang ditetapkan yaitu  $2,5 \pm 1\%$ . Demikian halnya dengan capaian indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memperoleh realisasi kinerja mencapai 73,70 poin jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 63,50 poin sehingga mendapatkan rasio capaian realisasi mencapai 116,06%, dan pada Indikator Kinerja Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan yang rasio capaian kinerjanya 102,71% dimana realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 97,57% dimana target kinerja yang ditetapkan yaitu 95,00%

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan antara lain:

- a. Sinergi bersama antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan dalam pemantauan dan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas di Kota Balikpapan utamanya bahan pokok dan pangan, sehingga di Tahun 2024 Kota Balikpapan menjadi kota

dengan inflasi *Year on Year* (YoY) terendah di Provinsi Kalimantan Timur.

- b. Peningkatan kualitas pegawai dalam pemanfaatan Sistem Pengadaan Pemerintah berupa Aplikasi SiRUP, e-Purchasing, e-Tenderring dan lain lain melalui program Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi utamanya oleh Pejabat Pengadaan Pemerintah dan Umumnya Para Pelaku Pengadaan barang dan Jasa dan Para Stakeholder terkait sehingga Proses Pengadaan Barang dan Jasa semakin lancar dan terpantau dengan baik.
- c. Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan



Gambar 3.3 Pelaksanaan Rakordal Pemantauan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Balikpapan Tahun 2024

Sumber : Arsip Pribadi

pembangunan baik fisik maupun non fisik pada tahun berjalan sehingga kendala kendala yang mungkin timbul selama tahun berjalan dapat segera dibahas dan diberikan solusi secepatnya.

- d. Terdapat juknis yang jelas dari Lembaga yang lebih tinggi terkait tata cara pelaksanaan dan penyusunan kebijakan di level pemerintah Kota sehingga kebijakan yang dibuat

memiliki dasar penyusunan dan kekuatan hukum yang jelas.

Sementara hal hal yang menjadi faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Kondisi curah hujan yang tinggi menyebabkan gangguan terhadap pasokan komoditas seperti bahan pokok serta perayaan Hari Besar Keagamaan yang ikut mempengaruhi lonjakan permintaan atas kebutuhan bahan pokok yang tersedia;
- b. Aktivitas Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Nusantara dimana aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berskala besar sehingga mempengaruhi peningkatan tekanan inflasi dari sisi konsumsi;
- c. Kenaikan upah minimum pun disinyalir ikut mempengaruhi peningkatan tingkat konsumsi masyarakat secara signifikan;
- d. Proses perubahan peraturan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah yang mengakibatkan perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi berulang kepada pengadministrasi kegiatan agar pemahaman dalam hal penggunaan aplikasi pengadaan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
- e. Terdapat beberapa target kegiatan yang membutuhkan perizinan dari level pemerintahan yang lebih tinggi sehingga menghambat pelaksanaan proses percepatan pelaksanaan pembangunan apabila tidak dilakukan monitoring secara berkala terhadap proses perizinannya.

Beberapa upaya solusi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:



Gambar 3.4 Pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) level meeting TPID, TPID dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Sumber : Arsip Pribadi

- a. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan koordinasi bersama antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan TPID Kota Balikpapan berupa pelaksanaan high

inspeksi pasar dan kawasan pertokoan, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (PGM) serentak di Kota Balikpapan;

- b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pengendalian secara Berkala terhadap monitoring proses pekerjaan fisik maupun keuangan seluruh Perangkat Daerah di yang tujuannya agar dapat segera beradaptasi apabila pada pelaksanaan terjadi hal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal;
- c. Sosialisasi rutin terhadap para pengampu kebijakan dan pelaksana teknis kegiatan terkait peraturan dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

### 3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pada sub bab ini menunjukkan analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun ini atas sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

**TABEL 3.9**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**  
**Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	96,62%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	76,54	95,68%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	79,00	76,33	96,62%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,00	78,33	99,15%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,00	75,22	88,49%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,00	76,50	90,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,00	75,06	88,31%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,00	76,89	90,46%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,00	74,67	87,85%
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100,00%
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100%	100%	100,00%
				Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan Organisasi	83,00	79,11	95,31%
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100%	100%	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100%	100%	100,00%
		Skor LPPD Kota Balikpapan	121,07%	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100%	100%	100,00%
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	90%	95%	105,56%
		Presentase Produk Hukum yang difasilitasi dan di harmonisasi	97%	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	110%	110,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	121.21%	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	83,25%	100%	120,12%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100%	100%	100,00%
		Nilai Inflasi Daerah	199.56%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100%	100%	100,00%
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	100.59%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100%	100%	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	116,06%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	77,6		110,66%

Hasil Pendataan terkait analisa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja disampaikan hal sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari sasaran strategis diatas diketahui bahwa rasio capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tercapai sebesar 96,62%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Penataan Organisasi, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Adapun kegiatan yang berdampak pada belum tercapainya target kinerja di antaranya :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Adanya rekomendasi dari Inspektorat Kota Balikpapan terkait Perlunya penyempurnaan pohon kinerja yang juga dapat mengidentifikasi kinerja urusan/sector lain yang bersinggungan dengan kinerja instansi pengampu (*cross cutting*).
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Perlunya Sosialisasi penggunaan Aplikasi SiPEMBELANJA sebagai alat pengendalian dan pemantauan proses administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sehingga proses pelaksanaan dan pemantauan administrasi keuangan semakin berjalan baik.

- c) Kegiatan Penataan Organisasi : Masih berlangsungnya proses alih status SDM pegawai melalui pengangkatan tenaga bantuan menjadi PPPK Pemerintah yang mengakibatkan harus dilakukan perumusan ulang dan penataan kembali mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- d) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Keterbatasan Jumlah Personil Keprotokolan dalam Kegiatan Pendampingan Kepala Daerah dalam menghadiri Kegiatan Koordinasi Kepala Daerah maupun acara-acara Pemerintahan lainnya.

2) Sasaran Strategis : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pada Sasaran Strategis di atas, dinilai melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Skor LPPD Kota Balikpapan, Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti, dan Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi memenuhi rata-rata rasio capaian 99,42%. Indikator ini terlaksana melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan Fasilitasi Kerjasama Daerah. Adapun faktor/kegiatan yang berdampak menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja di antaranya :

- a) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan : Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT RI dan Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Penguatan sektor pemeliharaan titik kontrol wilayah Kota Balikpapan berupa pemenuhan dan pemeliharaan Tugu Tapal Batas Daerah.



Gambar 3.5 Kegiatan Monitoring Tapal Batas Kel. Graha Indah – Kel. Karang Joang  
Sumber : Arsip Pribadi

- b) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat : Memfasilitasi Penyebarluasan informasi terkait Beasiswa kepada pelajar/mahasiswa Balikpapan juga Memfasilitasi keikutsertaan Khalifah Peserta MTQ Kota Balikpapan pada acara lomba MTQ Tingkat Kota dan Provinsi.
  - c) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum : Penerbitan Produk Hukum Daerah berupa SK, Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota dalam rangka menunjang legalitas hukum pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
  - d) Fasilitasi Kerjasama Daerah : Melalui Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan Fasilitasi kegiatan Perikatan Kerja Sama Antar Daerah serta Pemenuhan Kebutuhan Keikutsertaan Kepala Daerah dalam Acara Rapat Rapat Koordinasi Rutin Apeksi Kepala Daerah.
- 3) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dinilai

melalui 3 (tiga) indikator kinerja Nilai Inflasi Daerah, Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan, dan Presentase Rata Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan mencapai rata rata rasio capaian kinerja sebesar 139,44%. Indikator ini dipenuhi melalui Program Perekonomian dan Pembangunan dan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun kegiatan yang berdampak pada keberhasilan pencapaian target kinerja di antaranya :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian : Diadakan Seleksi Jabatan Pimpinan di Lingkungan Perusahaan Daerah Manuntung Sukses dan PDAM Tirta Manuntung Balikpapan, serta dilakukan Rapat Rapat Koordinasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama Tim TPID Kota Balikpapan dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
- b) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan : Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan APBD, DAK, dan Bankeu rutin serta pemenuhan kebutuhan data realisasi pembangunan organisasi perangkat daerah melalui Aplikasi SIPERANGKO dalam rangka memonitoring pekerjaan fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- c) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa : Rapat Koordinasi baik kepada pihak internal maupun pihak penyedia terkait penginputan rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP maupun rapat Pembahasan teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah termasuk Kegiatan Sosialisasi aturan pelaksanaan P3DN Pemerintah dan Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal teknis metode pelaksanaan dan kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan di Kota Balikpapan.

### 3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sub bab ini memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta anggaran.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang dimiliki. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat didalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 348 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan saat ini didukung oleh 126 orang pegawai PNS.

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki Laki	Prempuan
1	SEKRETARIS DAERAH	1	
2	ASISTEN	2	1
3	STAF AHLI	1	1
4	KABAG	6	4
5	KASUBAG	1	
6	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	14	21
7	PELAKSANA	42	32
	<b>JUMLAH PNS</b>	<b>67</b>	<b>59</b>

Sumber : Simpeg Sekretariat Daerah Tahun 2024

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN)**  
**Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	SD/SMP/SMA	78	42
2	D3	30	7
3	D4/S1	168	58
4	S2	72	19
	<b>JUMLAH PNS</b>	<b>348</b>	<b>126</b>

Sumber : Peta Jabatan Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2024

Berdasar gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 58 orang atau 4,03% dari total pegawai tersedia kemudian diikuti oleh pendidikan SD/SMP/SMA berjumlah 42 orang atau 33,33% dari keseluruhan pegawai, pendidikan S2 berjumlah 19 orang atau 15,08% dan dengan kualifikasi pendidikan D3 sebanyak 7 pegawai atau sebesar 5,56%, sementara secara total pegawai yang tersedia di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan masih mencapai 36,21% dari total pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Sekretariat Daerah.

Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan memaksimalkan beban tugas kepada personil yang tersedia dan efisiensi berupa penggunaan aplikasi tambahan yang dapat membantu memudahkan kinerja pegawai utamanya dalam urusan administrasi. Selain itu, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan juga tetap mengusahakan usulan penambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan

berupa perekrutan tenaga PNS baru maupun melalui pengangkatan PPPK Pemerintah.

## 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sarana prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Jumlah Aset yang Dimiliki dan Tidak Dipakai**

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
1	Tanah	1	387.196.653.857.00	0		Kondisi Baik
2	Peralatan dan Mesin	1	121.683.771.906.00	0		Kondisi Baik
3	Gedung dan Bangunan	1	43.879.099.310.00	0		Kondisi Baik
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	14.769.258.578.00	0		Kondisi Baik
5	Aset Tetap Lainnya	1	89.727.300.00	0		Kondisi Baik
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	0.00	0		Kondisi Baik
7	Aset Tidak Berwujud	1	2.250.002.804.00	0		Kondisi Baik
8	Aset Lain Lain	1	521.871.700.00	0		Kondisi Baik
9	Ak. Penyusutan		(110.871.233.814)			
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>459.519.151.642.00</b>	<b>0</b>	<b>0.-</b>	

Sumber : Data SIPD Sekretariat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan penjabaran pada Tabel 3.12 diatas, tampak bahwa sejumlah aset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan baik berupa aset tetap maupun aset tidak berwujud dan aset lainnya dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan walaupun terjadi penyusutan setiap tahunnya akibat penurunan

nilai masa manfaat barang namun juga turut dipengaruhi oleh kegiatan pemeliharaan aset yang rutin dilakukan setiap tahun.

### 3. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

**TABEL 3.13**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2024**  
**Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	79	76,33	96,62	149,334,741,601	121,647,112,672	81.46	Belum Efisien
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	3,16	3,16	100,00	35,266,432,379	30,004,823,753	85.08	14,92%
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	95%	93%	98,25	10,522,969,650	10,133,965,993	96.30	Belum Efisien
		Presentase produk hukum yang difasilitasi dan di harmonisasi	100%	100%	100,00	2,598,457,300	2,188,226,340	84.21	15,79%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang	Nilai Inflasi Daerah	2.5±1%	1,11%	199,56	860,000,000	701,289,708	81.55	59,14%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	63,5	73,7	116,06	1,426,000,000	1,283,560,816	90.01	22,45%
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	95,00%	97,57%	102,71	1,714,146,500	1,283,511,125	74.88	27,09%

Sumber : Dokumen Pribadi

Seperti yang terlihat pada tabel 3.13 diatas perihal Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena rata rata persentase penggunaan anggaran nilainya dibawah dari capaian kinerja yang ingin dicapai, meskipun terdapat beberapa realisasi capaian kinerja yang tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mencukupi dengan capaian kinerja 96,62% dan capaian penyerapan anggaran 81,46%, namun belum mencapai target capaian kinerja yang diharapkan.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi kinerja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terjadi pada beberapa program/kegiatan/subkegiatan sebagai berikut :

- a) Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang diberikan belum dapat dimanfaatkan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa rekomendasi atas Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan yang diberikan yang mempengaruhi nilai capaian SAKIP Sekretariat Daerah sehingga terjadi tidak efisiensi.
- b) Rencana alih guna dari Aplikasi eoffice milik Pemerintah Kota Balikpapan menjadi penggunaan Aplikasi Srikandi yang dibuat oleh kantor Arsip Nasional RI (ANRI) sebagai alternatif kegiatan surat menyurat secara digital namun pengaplikasiannya belum maksimal sehingga belum dianggarkan secara efektif dan efisien.

- c) Tidak terlaksananya rencana pengadaan aset tak berwujud sepanjang tahun berjalan.
  - d) Pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikarenakan sampai akhir tahun tidak ada Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga terjadi efisiensi anggaran hanya digunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah namun mempengaruhi pada Target Capaian Kinerjanya.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah mencukupi dengan rata rata capaian kinerja 99,42% dan rata rata capaian penyerapan anggaran 88,53% sehingga tingkat rata rata efisiensi anggaran sebesar 10,89%.
- Beberapa efisiensi diperoleh dengan dipengaruhi beberapa faktor dari masing masing Indikator Kinerja. Efisiensi pada Indikator Kinerja Skor LPPD Kota Balikpapan mencapai 14,92% yang dipengaruhi oleh beberapa kegiatan :
- a) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah terjadi efisiensi disebabkan beberapa kegiatan seperti Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Pada sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota yang sedianya akan diadakan Rapat Koordinasi bersama pihak Kecamatan dan Kelurahan dengan mengundang Narasumber dari Pihak Ketiga tidak dapat terealisasi disebabkan padatnya jadwal kegiatan termasuk Kegiatan Pemilu, Pileg dan Pemilukada Di Kota Balikpapan yang akhirnya kegiatan Rapat Koordinasi dilakukan secara terbatas di Kota Balikpapan.

- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan pada belanja sewa aset tidak berwujud terjadi efisiensi dikarenakan target awal sedianya akan digunakan untuk belanja paket berlangganan microsoft 365 namun kemudian ditangguhkan dengan pertimbangan masih dapat digunakan aplikasi yang sebelumnya.

Indikator Kinerja Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti tidak mencapai efisiensi anggaran disebabkan anggaran yang digunakan tidak mampu memenuhi target capaian kinerja yang ditetapkan. Hal ini disebabkan terdapatnya pengajuan pelaksanaan kerjasama daerah baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri yang diusulkan mendekati akhir periode tahun berjalan sehingga proses fasilitasi dan pembuatan MOU kerjasama baru terselesaikan di awal tahun berikutnya sehingga mengakibatkan penurunan nilai capaian kinerja tahunan.

Indikator Kinerja Presentase Produk Hukum yang difasilitasi dan ditindaklanjuti memenuhi capaian efisiensi sebesar 15,79% yang dipengaruhi oleh terpenuhinya capaian kinerja yang ditargetkan mencapai 100,00% dengan efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri berada diangka 84,21%. Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain :

- a) Meningkatnya jumlah produk hukum yang diajukan untuk difasilitasi oleh Perangkat Daerah juga diikuti jumlah peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh Bagian Hukum.
- b) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada setiap Sub Kegiatan terjadi efisiensi belanja bimbingan yang disebabkan terdapat belanja administrasi sidang yang tidak digunakan sepenuhnya karena mengikuti jadwal berlangsungnya persidangan dan belanja pelaksanaan kursus yang pada perencanaan dilaksanakan secara offline

namun dapat diefisiensi melalui pelaksanaan kursus secara online.

- 3) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan mencukupi rata-rata capaian kinerja hingga 139,44% dengan rata-rata capaian penyerapan anggaran 82,14% sehingga mencapai rata-rata target efisiensi hingga 36,23 dari anggaran yang diberikan.

Pencapaian tingkat efisiensi terhadap sumber daya anggaran atas sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dipengaruhi beberapa faktor dari masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a) Tingkat efisiensi pada Indikator Kinerja Nilai Inflasi Daerah mencapai efisiensi kinerja hingga 59,14%. Hal ini dipengaruhi oleh kestabilan harga komoditas pangan dan jasa di Tahun 2024 melalui gencarnya dilaksanakan Operasi Pasar, Gerakan Pasar Murah, dan Pemantauan terhadap ketersediaan pasokan bahan baku di pasar yang menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Balikpapan akibat pertambahan jumlah penduduk tetap dapat terjaga kondusivitasnya.
- b) Pada Indikator Kinerja Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan tercapai tingkat efisiensi mencapai 22,45% yang capaian kinerjanya berupa Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan memperoleh peningkatan yang cukup signifikan akibat penggunaan anggaran yang efektif dalam melakukan kegiatan baik Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis dengan tujuan peningkatan pemahaman para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa baik dari segi Pejabat Pengadaan selaku Pihak Pemerintah dan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pihak Ketiga. Juga didalam penerapan ketaatan dalam proses kegiatan pengadaan baik melalui

proses berupa tender maupun non tender yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- c) Tercapainya efisiensi pada Indikator Kinerja Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan dipengaruhi oleh Efektifnya penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Rapat Koordinasi perihal Evaluasi Berkala dan Pemantauan Kegiatan Fisik Perangkat Daerah di Lapangan oleh Tim sehingga peningkatan persentase rata rata capaian pembangunan fisik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat meningkat. Walaupun masih terdapat belanja pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan terdapat Anggaran Belanja Kegiatan Coastal Road yang belum dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan hingga tahun 2024 masih menunggu proses penetapan pelaksanaan pekerjaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun hal ini ikut menjadikan tambahan nilai efisiensi bagi penggunaan anggaran.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini digambarkan mengenai realisasi atas anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Serapan Anggaran Belanja Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2024 sebesar 82.91% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut :

**TABEL 3.14**  
**Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>149.334.741.601</b>	<b>121.647.112.672</b>	<b>81,46%</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>127.600.000</b>	<b>95.942.036</b>	<b>75,19%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.000.000	25.797.200	78,17%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.800.000	11.608.000	58,63%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.800.000	17.758.400	89,69%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000	40.778.436	74,14%
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.753.162.000</b>	<b>26.463.925.206</b>	<b>88,94%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.505.662.000	26.242.190.906	88,94%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.500.000	173.703.100	90,24%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.000.000	21.230.600	96,50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.000.000	26.800.600	81,21%
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.030.000.000</b>	<b>762.400.000</b>	<b>74,02%</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30.000.000	-	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000.000	762.400.000	76,24%
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>54.889.823.864</b>	<b>48.256.715.557</b>	<b>87,92%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000.000	703.885.000	<b>93,85%</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.042.124.580	1.817.319.000	<b>88,99%</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.574.103.600	1.427.357.799	<b>90,68%</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000.000	14.146.902.600	<b>88,42%</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	800.000.000	724.247.000	<b>90,53%</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	450.000.000	295.823.680	<b>65,74%</b>
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.273.595.684	20.881.322.894	<b>98,16%</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000.000	8.259.857.584	<b>68,83%</b>
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.564.420.000</b>	<b>8.342.058.889</b>	<b>87,22%</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.548.800.000	1.488.000.000	<b>96,07%</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000	675.000.000	<b>90,00%</b>
	Pengadaan Mebel	500.000.000	469.400.000	<b>93,88%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000.000	1.297.437.019	<b>86,50%</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.107.500.000	1.961.000.000	<b>93,05%</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.158.120.000	2.451.221.870	<b>77,62%</b>
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>32.761.800.030</b>	<b>22.846.598.361</b>	<b>69,74%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.400.000.000	2.545.354.532	<b>74,86%</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.361.800.030	20.301.243.829	<b>69,14%</b>
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.902.500.000</b>	<b>8.499.348.820</b>	<b>61,14%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000	1.096.238.327	<b>73,08%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.200.000.000	3.323.517.187	<b>63,91%</b>
	Pemeliharaan Mebel	160.000.000	149.000.000	<b>93,13%</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000.000	1.054.383.255	<b>70,29%</b>
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	25.000.000	<b>100,00%</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.017.500.000	1.763.776.244	<b>58,45%</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000.000	1.087.433.807	<b>43,50%</b>
8	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>2.426.070.157</b>	<b>1.939.941.940</b>	<b>79,96%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	230.781.163	81.387.493	<b>35,27%</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	372.089.708	<b>93,02%</b>
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.795.288.994	1.486.464.739	<b>82,80%</b>
9	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.840.000.000</b>	<b>1.606.897.600</b>	<b>87,33%</b>
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	940.000.000	762.293.500	<b>81,10%</b>
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	750.000.000	701.258.600	<b>93,50%</b>
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	150.000.000	143.345.500	<b>95,56%</b>
10	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>943.865.550</b>	<b>891.190.263</b>	<b>94,42%</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	204.000.000	196.367.916	<b>96,26%</b>
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	306.900.000	299.607.986	<b>97,62%</b>
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	132.500.000	102.393.929	<b>77,28%</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200.200.000	199.079.000	<b>99,44%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100.265.550	93.741.432	<b>93,49%</b>
11	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.095.500.000</b>	<b>1.942.094.000</b>	<b>92,68%</b>
	Fasilitasi Keprotokolan	737.000.000	677.778.500	<b>91,96%</b>
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	720.500.000	664.288.500	<b>92,20%</b>
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	638.000.000	600.027.000	<b>94,05%</b>
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>48.387.859.329</b>	<b>42.327.016.086</b>	<b>87,47%</b>
12	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>16.869.271.190</b>	<b>14.141.118.850</b>	<b>83,83%</b>
	Penataan Administrasi Pemerintahan	8.883.041.890	7.998.721.134	<b>90,04%</b>
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	918.000.000	613.523.058	<b>66,83%</b>
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7.068.229.300	5.528.874.658	<b>78,22%</b>
13	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>18.397.161.189</b>	<b>15.863.704.903</b>	<b>86,23%</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.323.961.189	13.948.308.764	<b>85,45%</b>
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.963.200.000	1.816.046.139	<b>92,50%</b>
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	110.000.000	99.350.000	<b>90,32%</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	terkait Kesejahteraan Masyarakat			
14	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>2.598.457.300</b>	<b>2.188.226.340</b>	<b>84,21%</b>
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	549.277.000	504.975.463	<b>91,93%</b>
	Fasilitasi Bantuan Hukum	799.180.300	500.864.503	<b>62,67%</b>
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.250.000.000	1.182.386.374	<b>94,59%</b>
15	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>10.522.969.650</b>	<b>10.133.965.993</b>	<b>96,30%</b>
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10.257.969.750	9.918.725.435	<b>96,69%</b>
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	264.999.900	215.240.558	<b>81,22%</b>
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>4.000.146.500</b>	<b>3.268.361.649</b>	<b>81,71%</b>
16	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>860.000.000</b>	<b>701.289.708</b>	<b>81,55%</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	500.000.000	398.520.292	<b>79,70%</b>
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	160.000.000	157.263.595	<b>98,29%</b>
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	200.000.000	145.505.821	<b>72,75%</b>
17	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>1.714.146.500</b>	<b>1.283.511.125</b>	<b>74,88%</b>
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	238.457.500	187.058.154	<b>78,45%</b>
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	475.466.500	309.403.894	<b>65,07%</b>
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1.000.222.500	787.049.077	<b>78,69%</b>
18	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.426.000.000</b>	<b>1.283.560.816</b>	<b>90,01%</b>
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	319.500.000	277.956.101	<b>87,00%</b>
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	353.000.000	319.374.145	<b>90,47%</b>
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	753.500.000	686.230.570	<b>91,07%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>201.722.747.430</b>	<b>167.242.490.407</b>	<b>82,91%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 ditarik kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 terdapat 3 (Tiga) Sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai jabaran dari visi misi dan strategi Sekretariat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. LKjIP disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil serta sebagai sarana untuk gambaran pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran 1

Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Rasio Realisasi Capaian Kinerja mencapai 96.62% atau Tidak tercapai.

b. Pencapaian Sasaran 2

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 buah indikator kinerja yaitu Skor LPPD Kota Balikpapan, Presentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti, dan Presentase Produk Hukum yang

difasilitasi dan diharmonisasi dengan rata-rata realisasi Capaian Kinerja mencapai 99,42% atau Capaian Tidak Memenuhi Target.

c. Pencapaian Sasaran 3

Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas 3 indikator kinerja dengan masing-masing capaian kinerjanya yaitu nilai inflasi daerah melebihi target dengan 199,56%, nilai indeks tata Kelola pengadaan dengan persentase capaian 116,06%, dan presentase rata-rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan dengan capaian 102,71%, dengan rata-rata rasio capaian realisasi mencapai 139,44% atau Melebihi Target.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis beserta 7 (tujuh) indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan trend yang baik untuk mencapai target akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yaitu dengan rata-rata capaian kinerja seluruhnya adalah 116.17% atau Capaian Melebihi Target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi preseden baik dalam kelanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tahun berikutnya. Walaupun demikian, adanya beberapa indikator sub kegiatan yang capaiannya belum memenuhi target diharapkan mendapat perhatian lebih untuk sebagai perbaikan dan peningkatan hasil untuk periode berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023, terpenuhi sesuai dengan harapan.

## 2. SARAN

Menghadapi tantangan dan hambatan seperti yang telah disebutkan di atas maka upaya-upaya strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depan adalah:

- a. Penguatan koordinasi antar Bagian
  - 1) Lebih mengintensifkan atau sosialisasi pelaksanaan pekerjaan atau belanja kegiatan agar dilakukan sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat sejak awal, agar tidak terjadi “kejar tayang” terhadap pelaksanaan pekerjaan yang proses pengerjaannya memerlukan waktu yang cukup panjang;
  - 2) Perlu dilaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar Bagian yang terintegrasi dalam urusan pembahasan isu isu strategis yang menjadi bagian dari tupoksi agar tercipta suatu kesatuan visi dan pemahaman terkait aksi yang perlu dilakukan untuk menuntaskan capaian target sasaran Kepala Perangkat Daerah yang menjadi tugas bersama.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia
  - 1) Tetap dijalkannya program Pembinaan, kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan metode atau sistem pembelajaran yang reformatif yang disesuaikan dengan tuntutan kondisi perubahan dan kebutuhan beban kerja yang menuntut inovasi dan kreativitas;
  - 2) Pembinaan mental spiritual aparatur Pemerintah Daerah;
  - 3) Penambahan Personil Pegawai dengan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan untuk menunjang percepatan pelaksanaan kegiatan melalui mutasi pegawai atau penambahan pegawai baru.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam pengumpulan data dan pembagian informasi secara efektif. Untuk Indikator Kinerja yang belum berorientasi hasil/*outcomes* maka perlu diadakan reuiu bersamaan dengan reuiu berkala sebagai bahan evaluasi penetapan indikator kinerja perencanaan pembangunan berikutnya.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

  
**MUHAIMIN, S.T., M.T**